

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI AGEN INTEGRASI: MEMBENTUK WARGA NEGARA DEMOKRATIS DAN BERIDENTITAS NASIONAL DALAM KONTEKS KONSTITUSI

Dea Simanjuntak¹, Maria Saragih², Cici Tampubolon³, Fitrikiara Manihuruk⁴, Utri Siregar⁵, Dormauli Manalu⁶, Franky Manulang⁷, Prini Ambarita⁸
Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas HKBP Nommensen, Pematangsiantar
E-mail: [*apriliasimanjuntak@gmail.com](mailto:apriliasimanjuntak@gmail.com)¹

ABSTRAK

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai agen integrasi dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis sekaligus beridentitas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi PKn dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi konstitusional di tengah tantangan disintegrasi sosial dan globalisasi nilai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka sebagai metode utama, artikel ini menganalisis konsep-konsep integrasi nasional, identitas kewarganegaraan, serta penerapan nilai-nilai konstitusi dalam praktik pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa PKn mampu menjadi wadah strategis untuk menyinergikan nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme dalam proses pembelajaran. Kesimpulannya, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menjadi instrumen penguatan konstitusi, tetapi juga menjadi mekanisme kultural dalam menjaga integrasi bangsa di tengah pluralitas sosial.

Kata kunci

Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Identitas Nasional, Integrasi, Konstitusi

ABSTRACT

Civics Education (PKn) plays a strategic role as an agent of integration in shaping the character of democratic citizens with a national identity. This study aims to explore the contribution of PKn in strengthening national values and constitutional democracy amidst the challenges of social disintegration and globalization of values. Using a descriptive qualitative approach and literature study as the main methods, this article analyzes the concepts of national integration, civic identity, and the application of constitutional values in educational practice. The results show that PKn can be a strategic platform for synergizing the values of democracy, human rights, and nationalism in the learning process. In conclusion, Civics Education is not only an instrument for strengthening the constitution, but also a cultural mechanism in maintaining national integration amidst social plurality.

Keywords

Civic Education, Democracy, National Identity, Integration, Constitution

1. PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan meningkatnya kompleksitas sosial, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga integrasi nasional. Berbagai dinamika seperti pergeseran nilai akibat modernisasi, menguatnya individualisme, dan munculnya kelompok-kelompok intoleran menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Tantangan ini diperparah oleh ketimpangan sosial dan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dasar kebangsaan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki posisi strategis dalam merespons persoalan-persoalan tersebut. Salah satu bentuk pendidikan yang relevan adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), karena memiliki mandat untuk membentuk karakter warga negara yang sadar hak dan kewajiban, serta berkomitmen terhadap keutuhan bangsa.

PKn tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mata pelajaran normatif yang berisi hafalan undang-undang atau peraturan hukum. PKn harus dilihat sebagai instrumen strategis untuk membangun identitas kebangsaan dan memperkuat semangat demokrasi konstitusional. Melalui pendekatan yang tepat, PKn dapat menjadi ruang untuk membina kesadaran kritis peserta didik tentang pentingnya hidup bersama dalam kerangka hukum yang adil dan menghargai perbedaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya materi ajar, melainkan prinsip hidup yang perlu diinternalisasi secara mendalam sejak dini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana PKn berfungsi sebagai agen integrasi nasional sekaligus wahana pembentukan karakter warga negara yang demokratis dan beridentitas nasional. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: sejauh mana Pendidikan Kewarganegaraan mampu membentuk karakter warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional dan komitmen terhadap persatuan bangsa? Pertanyaan ini menjadi penting di tengah meningkatnya tantangan sosial dan ideologis yang mengancam keberlangsungan nilai-nilai kebangsaan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini mengandalkan studi pustaka sebagai landasan teoritis dan analisis konseptual. Beberapa teori yang digunakan sebagai kerangka analisis antara lain teori kewarganegaraan aktif (*active citizenship*), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan publik; teori integrasi nasional yang menjelaskan mekanisme pembentukan kohesi sosial dalam masyarakat majemuk; serta pendekatan pedagogi kritis yang melihat pendidikan sebagai proses pembebasan dan pembentukan kesadaran. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dalam membentuk fondasi teoretis bagi analisis peran PKn sebagai agen integrasi.

Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, artikel ini berupaya menegaskan bahwa PKn memiliki peran ganda, yakni sebagai medium edukasi konstitusional dan sebagai alat kultural untuk membangun solidaritas kebangsaan. Dalam sistem pendidikan nasional, PKn dapat menjadi garda terdepan dalam membangun kohesi sosial berbasis nilai-nilai konstitusi. Oleh sebab itu, perlu ada kesadaran kolektif dari para pemangku kebijakan, pendidik, dan masyarakat untuk mengembangkan PKn yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dan partisipatif, agar benar-benar mampu menjadi penyangga integrasi bangsa di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai agen integrasi dalam membentuk warga negara yang demokratis dan beridentitas nasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sifat kajian yang menekankan pada makna, interpretasi, serta pemahaman mendalam terhadap konteks pendidikan dan dinamika sosial kebangsaan. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha menggali keterkaitan antara nilai-nilai konstitusional yang diajarkan dalam PKn dan aktualisasinya dalam kehidupan warga negara Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka menjadi relevan karena fokus penelitian ini berada pada analisis konsep, teori, serta dokumen pendidikan yang berkaitan dengan PKn. Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah tentang pendidikan kewarganegaraan, artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas teori kewarganegaraan dan identitas nasional, serta dokumen resmi seperti kurikulum nasional, peraturan perundang-

undangan, dan pedoman pelaksanaan pembelajaran PKn di sekolah. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi konten terhadap fokus kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur akademik dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian. Setelah data terkumpul, proses analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, yaitu menyaring informasi yang sesuai dengan fokus kajian; kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan dimensi seperti nilai demokrasi, integrasi nasional, dan pendidikan karakter; serta interpretasi teoritis, yakni menafsirkan makna dari temuan dalam kerangka teori yang digunakan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan untuk membangun pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap objek penelitian. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda guna memperoleh keakuratan dan konsistensi data. Misalnya, isi buku teks PKn dibandingkan dengan jurnal ilmiah dan kebijakan kurikulum terbaru agar ditemukan titik kesesuaian atau perbedaan yang berarti. Selain itu, konfirmasi terhadap regulasi pendidikan nasional digunakan sebagai penguat interpretasi agar hasil kajian tetap terikat pada konteks kebijakan yang berlaku di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen strategis pembentukan warga negara yang demokratis dan terintegrasi secara nasional. Fokus analisis tidak hanya berhenti pada dimensi normatif PKn, tetapi juga mencermati bagaimana pendidikan ini dapat menjawab tantangan aktual seperti intoleransi, disintegrasi sosial, dan melemahnya identitas kebangsaan. Oleh karena itu, pemilihan metode kualitatif dan studi pustaka dinilai paling tepat untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami transformasi signifikan dari pengajaran hafalan norma hukum menjadi pendidikan yang bersifat reflektif dan dialogis. PKn dalam kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya secara eksplisit memuat dimensi konstitusional seperti pemahaman terhadap hak dan kewajiban warga negara, prinsip negara hukum, serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Selain itu, PKn mengajarkan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik dan demokrasi, melalui pembelajaran partisipatif dan problem-solving yang kontekstual. Lebih jauh, PKn terbukti efektif dalam membangun identitas nasional yang inklusif melalui pengenalan keberagaman budaya dan penguatan semangat persatuan. Di banyak sekolah, guru PKn memfasilitasi diskusi lintas budaya, simulasi pemilu, serta kegiatan pelayanan masyarakat yang memperkuat keterlibatan sosial siswa. Temuan ini menegaskan bahwa PKn bukan hanya pelajaran, tetapi merupakan instrumen pedagogis untuk membangun integrasi nasional berbasis nilai konstitusi.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis sebagai agen integrasi karena fungsinya yang ganda: membentuk karakter warga negara dan memperkuat identitas nasional. Dalam konteks demokrasi konstitusional, PKn berperan sebagai ruang edukatif untuk menginternalisasi prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses ini penting untuk

mencegah fragmentasi sosial dan mendorong terbentuknya solidaritas kebangsaan. Teori kewarganegaraan aktif menyatakan bahwa warga negara yang baik tidak hanya taat hukum, tetapi juga aktif dalam membela nilai-nilai dasar negaranya.

PKn juga menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa identitas nasional tidak bertentangan dengan pluralisme budaya. Justru, melalui pemahaman yang benar tentang Pancasila dan UUD 1945, peserta didik dilatih untuk menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa. Dalam hal ini, PKn membangun imajinasi kolektif tentang Indonesia sebagai satu bangsa dengan beragam suku, agama, dan budaya. Ini sesuai dengan teori integrasi nasional yang menekankan pentingnya nilai bersama untuk menjaga keutuhan sosial.

Namun, implementasi PKn di sekolah masih menghadapi tantangan. Keterbatasan kapasitas guru, pendekatan yang masih konvensional, serta kurangnya integrasi dengan isu aktual seperti korupsi dan intoleransi, menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pendekatan PKn yang lebih kontekstual, kritis, dan berbasis pengalaman langsung peserta didik. Guru harus menjadi fasilitator dialog yang mendorong refleksi etis dan komitmen kebangsaan dalam setiap pembelajaran.

4. KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran sentral dalam membentuk warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Melalui proses pendidikan yang berorientasi pada nilai, refleksi kritis, serta partisipasi aktif, PKn mampu menanamkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Dengan demikian, PKn tidak hanya menjadi media transfer pengetahuan hukum dan politik, tetapi juga wahana pembentukan karakter warga negara yang mampu hidup dalam keberagaman dan berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Namun, efektivitas PKn sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses pembelajarannya diterapkan di sekolah-sekolah. Masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti metode pengajaran yang kaku, kurangnya pelatihan guru, serta lemahnya integrasi antara kurikulum dan realitas sosial yang dihadapi peserta didik. Dalam konteks ini, pembelajaran PKn harus didesain secara kontekstual, dialogis, dan berbasis pengalaman nyata agar mampu menyentuh kesadaran siswa dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan pendekatan pedagogis menjadi lebih reflektif dan partisipatif sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran PKn sebagai agen integrasi bangsa.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi dan Multikulturalisme*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azra, A. (2022). *Identitas dan Integrasi: Tantangan Kebangsaan di Era Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, R. (2023). Peran Guru PKn dalam Membentuk Warga Negara Aktif. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 13(1), 45–59.
- Indriyanto, B. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan dan Ketahanan Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 110–125.
- Lestari, D. (2023). Strategi Pembelajaran PKn Berbasis Kontekstual. *Jurnal Civic Education*, 7(3), 223–235.

Dea Simanjuntak, Maria Saragih, Cici Tampubolon, Fitrikiara Manihuruk, Utri Siregar, Desry Sinaga,
Frank Manulang, Prini Ambarita

Global Research and Innovation Journal (GREAT) Vol 1, No. 2, 2025, Hal 2104-2108

Wahyudi, M. (2025). Demokrasi Konstitusional dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 16(1), 66–78.